

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Kemajuan dan pertumbuhan suatu negara diukur dengan kecepatan ekspansi ekonominya. Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik ketika keadaannya terus membaik untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satu prioritas negara dalam mengembangkan berbagai kebijakan untuk mendorong kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat memotivasi pemerintah untuk memperluas dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak mungkin memisahkan fungsi lembaga keuangan dari pertumbuhan ekonomi yang kuat di suatu negara. Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga keuangan: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Setiap lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga non-bank, secara signifikan meningkatkan perekonomian

Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuatif saat ini. Perkembangan organisasi ekonomi dan badan usaha berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam upaya memantapkan perekonomian masyarakat sehingga tercipta tatanan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Koperasi merupakan salah satu badan usaha keuangan non bank yang berkembang dan dekat dengan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi sebagai pilar perekonomian nasional, memungkinkan koperasi untuk mendirikan badan usaha yang kokoh yang dibangun dalam kemitraan dengan rakyat untuk kepentingan semua. Koperasi didirikan di Indonesia dengan beberapa tujuan, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, taraf hidup masyarakat pada umumnya, dan ikut serta dalam mewujudkan tatanan perekonomian nasional guna mencapai keadilan dan kemakmuran (J. Nugraha, 2020).

Koperasi tumbuh subur di banyak provinsi di Indonesia, termasuk Bali. Koperasi kini hadir di delapan kabupaten dan satu kota, Kota Denpasar, di Bali. Kabupaten tersebut antara lain Buleleng, Giayar, Bangli, Karangasem, Jembrana, Klungkung, Tabanan, dan Badung. Semua jenis koperasi berkembang pesat di Bali, termasuk koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen, dan koperasi simpan pinjam. Salah satu daerah yang koperasinya beragam, Kabupaten Karangasem, perkembangannya fluktuatif setiap tahunnya. Banyaknya perkembangan koperasi mencerminkan salah satu dari banyaknya perkembangan koperasi di setiap kabupaten di Bali. Namun, fakta bahwa jumlah koperasi di setiap kabupaten setiap tahunnya berfluktuasi tidak dapat dipungkiri. Hal ini terlihat dari kuantitas koperasi yang dinamis di setiap daerah di Bali. Tabel yang menunjukkan perubahan jumlah koperasi yang saat ini beroperasi dari tahun 2019 ke 2021 yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Prov Bali disajikan:

**Tabel 1.1.**  
**Koperasi Aktif Setiap Sekabupaten Selama Tahun 2019-2021**

No	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021
1	Bangli	191	195	198
2	Karangasem	213	218	227
3	Buleleng	319	329	404
4	Jembrana	207	204	213
5	Tabanan	418	427	405
6	Badung	499	522	533
7	Gianyar	953	966	854
8	Klungkung	115	117	122

Sumber: Data diolah, 2023

Setiap kabupaten di Bali mengalami peningkatan atau penurunan jumlah koperasi yang aktif, seperti terlihat pada tabel 1.1. Di setiap kabupaten, jumlah koperasi bertambah atau berkurang dalam jumlah kecil. Dari delapan kabupaten yang ditunjukkan pada tabel di atas, Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan jumlah koperasi yang aktif selama tiga tahun. Selain itu, perkembangan koperasi di sejumlah kabupaten tidak stabil, dengan jumlah koperasi yang aktif berfluktuasi selama tiga tahun. Jika melihat tiga tahun ke depan, dari 2019 hingga 2021, ada dua Kabupaten dengan pertambahan jumlah koperasi terbesar. Di Kabupaten Badung bertambah 34 unit koperasi yang aktif, dan di Kabupaten Buleleng bertambah 85 unit koperasi yang aktif. Ada faktor lain yang menentukan sehat tidaknya koperasi di suatu kabupaten selain peningkatan jumlah koperasi yang aktif. Hal ini karena di setiap Kabupaten ada koperasi yang tidak aktif.

Perkembangan koperasi di Bali di masing-masing Kabupaten sempat naik dan turun, yang disebabkan oleh beberapa keadaan. Koperasi bisa menjadi tidak aktif akibat kondisi tersebut. Selama empat tahun, terlihat bahwa jumlah koperasi yang tidak beroperasi berfluktuasi antara bertambah dan berkurang di setiap kabupaten. Baik variabel internal maupun eksternal dapat berkontribusi pada ketidakaktifan kooperatif. Salah satunya adalah wabah Covid-19 di tahun 2019 yang menekan perekonomian dan dapat berdampak pada tidak aktifnya koperasi. Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan jumlah koperasi nonaktif yang dihimpun dari Dinas Koperasi dan UKM Prov Bali antara tahun 2018 – 2021:

**Tabel. 1.2**  
**Koperasi Tidak Aktif Setaip Kabupaten Selama Thn 2018-2021**

No	Kab	2018	2019	2020	2021
1	Bangli	21	43	41	40
2	Karangasem	37	111	108	108
3	Buleleng	49	66	66	81
4	Jembrana	61	63	70	69
5	Tabanan	129	168	167	163
6	Badung	42	68	67	68
7	Gianyar	235	286	286	423
8	Klungkung	26	26	33	29

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 Kabupaten Karangasem memiliki 74 koperasi tidak aktif pada tahun 2018–2019, Kabupaten Gianyar memiliki 51 koperasi tidak aktif pada tahun 2018–2019, dan Kabupaten Tabanan memiliki 39 koperasi tidak aktif pada tahun 2018–2019. Kabupaten ini mengungguli kabupaten lain dalam hal jumlah koperasi yang tidak aktif. Karena peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif secara signifikan di Kabupaten Karangasem, lokasi ini dipilih untuk penelitian.

Kabupaten Karangasem memiliki prospek terbaik untuk tiga tahun ke depan, seperti terlihat pada tabel 1.3 dari tahun 2019 hingga 2021, jumlah koperasi yang tidak aktif dapat ditekan dengan penurunan yang stabil masing-masing sebesar 34%, 33%, dan 32%. Berbeda dengan Kab Gianyar dan Tabanan yang jumlah koperasinya tidak stabil dan tidak aktif mengalami penurunan. Hal ini menjadikan perlunya dilakukan penelitian di Kabupaten Karangasem, dimana jumlah koperasi yang saat ini beroperasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dan akan terjadi penurunan jumlah koperasi yang tidak beroperasi secara terus menerus selama tiga tahun ke depan. Dilihat dari tidak sehat koperasi belum dapat dipastikan dengan banyak atau tidaknya jumlah koperasi yang tidak aktif pada setiap Kabupaten

**Tabel. 1.3**  
**Data Penurunan Jumlah Koperasi Tidak Aktif Tahun 2019-2021**

Kab	2019			2020			2021		
	Jlm Kop	Tidak Aktif	%	Jlm Kop	Tidak Aktif	%	Jlm Kop	Tidak Aktif	%
Tabanan	586	168	29%	594	167	28%	568	163	29%
Gianyar	1.239	286	23%	1.252	286	23%	1.277	423	33%
Karangasem	324	111	34%	326	108	33%	335	108	32%

Sumber: Data diolah, 2023

Di Kabupaten Karangasem banyak koperasi yang tidak aktif. Terdapat berbagai jenis koperasi di 8 kecamatan dan 78 desa/kelurahan. Berbagai jenis koperasi diharapkan dapat menopang perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi produsen, dan koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang tersebar. Dari 4 jenis koperasi tersebut, salah satu koperasi yang telah menjadi perhatian pemerintah adalah (KSP). KSP di Kabupaten Karangasem merupakan jenis koperasi yang paling banyak anggotanya dari jenis lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sebuah lembaga keuangan non-bank, menerima simpanan dan meminjamkan uang kepada anggotanya sebagai bagian dari operasi bisnisnya. (Indris, 2021). Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi diatur dalam PP No. 9 Tahun 1995, serta langkah-langkah menerima dana dan menggunakannya untuk membantu anggota yang menggunakan jasanya. Kegiatan KSP harus diimbangi dengan kerjasama oleh para anggota yang memegang teguh kepercayaan. Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu fokus pemerintah agar para

pengurus/anggota tidak melakukan tindakan penyelewengan dana atau penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak atas mengatas namakan koperasi, selain itu karena perkembangan koperasi simpan pinjam yang cukup berfluktuasi yang dilihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU). KSP di Kabupaten Karangasem masih sangat perlu dikembangkan supaya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat memberikan dampak kesejahteraan masyarakat.

Balipost.com melaporkan pada tahun 2020 ini Pemprov Bali memberikan bantuan stimulus usaha (BSU) kepada 96 dari 227 koperasi yang berdiri di Kabupaten Karangasem. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Karangasem menggunakan fakta bahwa setiap koperasi yang mendapat BSU menerima 10 juta rupiah, dan bahwa bantuan yang diberikan kepada 96 koperasi adalah tahap awal untuk membenarkan hal tersebut (Toya, 2020). sedangkan koperasi lainnya masih melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk menerima BSU pada tahap selanjutnya. Koperasi yang masih beroperasi, memiliki manajemen keuangan yang efektif, dan secara konsisten menyampaikan laporan keuangan tahunan adalah persyaratan untuk menerima dana pemerintah. Dipercayai bahwa BSU dapat digunakan sebagai pendanaan dalam keadaan keuangan yang tidak sehat.

Pelaksanaan kegiatan operasional koperasi di Kabupaten Karangasem kurang maksimal setelah memperoleh bantuan dana dari pemerintah provinsi bali. Koperasi di Kabupaten Karangasem saat ini menjadi sorotan, dimana Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Karangasem mengusulkan sebanyak 108 koperasi tidak aktif untuk dibubarkan. Usulan pembubaran ini telah dikirim ke Kementrian Koperasi dan

UKM. Alasan diajukan usulan tersebut oleh Dekopinda Karangasem karena sebanyak 108 koperasi tidak melaksanakan RAT secara berturut-turut (Santika, 2022). Meski telah dilakukan pembinaan namun tidak ada perkembangan (Toya, 2019). Ketua Dekopinda mengungkapkan telah memverifikasi sebanyak 325 koperasi di Kabupaten Karangasem. Sebanyak 114 koperasi mendapat pembinaan dan hanya 6 koperasi yang bisa bangkit dari 114, sementara sebanyak 108 koperasi lainnya tidak ada perubahan. Indrayana menegaskan, sebanyak 108 koperasi hanya sebatas papan nama, tidak ada kegiatan operasional, kepengurusan tidak terstruktur, serta menegaskan bahwa hanya 211 koperasi aktif, dan koperasi yang melaksanakan RAT hanya sebanyak 143 atau sebesar 67,77%. Terjadinya permasalahan tersebut disebabkan karena beberapa faktor pada koperasi tidak aktif dan belum melaksanakan RAT hingga 100% dari total jumlah koperasi aktif, diantaranya prestasi kinerja pengurus yang rendah, baik dari pemahaman laporan keuangan, kurangnya pemanfaatan teknologi, sehingga tidak mampu menjalankan tuntutan yang dikerjakan seperti melaksanakan RAT dan pelaporan keuangan secara tepat waktu.

Santika selaku mantan sekretaris dinas perindustrian perdagangan menegaskan bahwa pelaksanaan RAT serta pelaporan keuangan diharapkan mampu lebih cepat dilaksanakan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Namun hal tersebut dibantah, meskipun telah dihimbau dan di bina secara langsung oleh diskopprindag masih saja banyak koperasi di Kabupaten Karangasem yang tidak melaksanakan RAT dan pelaporan keuangan, karena pengurus koperasi tidak paham dan tidak bisa dalam menyusun laporan. Selain itu Bupati Karangasem menyatakan perkembangan koperasi



di Kabupaten Karangasem secara kuantitas mengalami perkembangan yang signifikan. Namun secara kualitas koperasi di Kabupaten Karangasem masih sangat rendah, khususnya dalam prestasi kinerja koperasi. Rendahnya prestasi kinerja dilihat dari banyaknya koperasi yang belum melaksanakan RAT sekaligus pelaporan laporan keuangan yang menimbulkan banyak koperasi di Kabupaten Karangasem tidak beroperasi.

Kualitas sumber daya manusia tidak hanya sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan tetapi juga sangat mempengaruhi perkembangan koperasi. Banyak faktor yang menyebabkan ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan koperasi di Kabupaten Karangasem dan pelaksanaan RAT, antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki setiap koperasi dalam hal pencapaian kinerja dalam pemanfaatan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang pelaporan keuangan. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia bagi koperasi untuk penyusunan laporan keuangan, pelaporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan RAT di Kabupaten Karangasem lambat. KSP menjadi pusat perhatian publik, karena koperasi ini memiliki kegiatan yang sangat sibuk, salah satunya dalam kegiatan keuangan. KSP Kabupaten Karangasem saat ini menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain kesalahan pembukuan, simpanan yang tidak seimbang, pencatatan dan perhitungan kredit yang tidak akurat, serta permasalahan kredit macet yang semuanya berpotensi mempengaruhi kebangkrutan koperasi.

Prestasi kinerja SDM pada koperasi simpan pinjam sangat diperlukan dalam mengelola keuangan. Semakin baik kualitas SDM, baik dalam bidang pemahaman

laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja pengurus yang disiplin maka pengelolaan keuangan, baik dalam penyajian, pengungkapan dan pelaksanaan RAT dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Pentingnya pelaksanaan RAT selain untuk memberikan citra koperasi tersebut baik adalah untuk menghindari resiko kebangkrutan koperasi karena permasalahan keuangan, kekurangan SDM berkualitas, dan manajemen keuangan yang kurang baik, serta menghindari resiko penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan koperasi. Menurut (Toya, 2020) pentingnya pelaksanaan RAT untuk mengetahui indikator kesehatan koperasi yang meliputi RAT tepat waktu, laporan keuangan tansaparan, kinerja pengurus, pegawai, manajemen berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Pengurus koperasi harus mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya sebagai akibat dari RAT yang merupakan forum tertinggi untuk menentukan arah koperasi ke depan. Menurut DKincai (2018), koperasi yang selalu melakukan RAT setahun sekali dianggap sehat. Meskipun demikian, sebagian besar koperasi terus menunda pengadopsian RAT mereka. Jika kita lihat dalam kurun waktu tiga tahun lebih, tingkat RAT yang dilakukan oleh koperasi di Kabupaten Karangasem khususnya pada tahun 2019 dengan jumlah 213 koperasi aktif, telah melaksanakan 85%, untuk tahun 2020 dengan jumlah 218 koperasi aktif, 65% telah melaksanakan RAT, dan pada tahun 2021 dengan jumlah 227 koperasi aktif, 70% RAT telah dilakukan. Walaupun Koperasi di Kabupaten Karangasem telah melaksanakan RAT lebih dari 50%, akan sangat bermanfaat jika Koperasi mencapai 100%, karena hal ini menunjukkan citra koperasi yang positif bagi anggotanya. Tingkat penerapan RAT merupakan salah satu

dari sekian banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi cepatnya pelaporan pertanggungjawaban keuangan koperasi.

Pemahaman terhadap laporan keuangan berdampak pada seberapa cepat laporan keuangan koperasi dilaporkan. Proses menyiapkan manajemen koperasi untuk menjalankan kewajibannya adalah bagaimana laporan keuangan koperasi didefinisikan, menurut Hamdani & Zuhrotun Aulia (2018). Koperasi bisa mendapatkan keuntungan dengan memiliki pemahaman yang kuat, seperti mengelola laporan koperasi sesuai dengan standar. Dalam menyajikan laporan keuangan, seperti arus kas, neraca, l/r, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan, pemahaman yang baik akan sesuai dengan SAK-ETAP yang berlaku. Temuan dari penelitian (Hamdani & Zuhrotun Aulia, 2018; Arismawati & Erni, 2017), menunjukkan bahwa pemahaman laporan keuangan pengurus koperasi berdampak positif terhadap pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Namun berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Sari (2017) menyatakan bahwa keterpahaman terhadap akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kec Marga.

Pemahaman yang luas tentang laporan keuangan koperasi dapat memudahkan khususnya bagi koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem dalam menginterpretasikan suatu perilaku yang sesuai standar dengan keahliannya, oleh karena itu pemahaman tentang laporan keuangan dipilih sebagai variabel ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Pemahaman yang baik akan mempercepat manajemen, pembukuan, pelaporan keuangan, dan implementasi

RAT tepat waktu dengan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, pemahaman laporan keuangan koperasi dipilih, karena perbedaan dalam hasil temuan sebelumnya, pemahaman laporan keuangan koperasi akan di uji coba dalam penelitian ini sehingga diketahui apakah ada pengaruh variabel pemahaman laporan keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan KSP Kab. Karangasem.

Kinerja pengurus merupakan komponen kedua yang mempengaruhi ketepatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan koperasi.. (Sudarsono & Edilius, 1996), pengurus koperasi adalah anggota yang dipilih oleh anggota dan wajib melaksanakan kegiatan koperasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi secara keseluruhan melalui kegiatan operasionalnya. Komponen penting koperasi adalah pengurus yang kompeten, yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kemampuan pengurus itu sendiri merupakan salah satu indikator kinerja pengurus koperasi yang baik. Keterampilan pengurus yang harus dimiliki saat mengelola koperasi, antara lain kemampuan merancang anggaran kerja, berkomunikasi secara efektif, dan keterampilan lain yang berkaitan dengan koperasi. Ketepatan waktu pelaporan keuangan koperasi akan dipengaruhi oleh kinerja manajemen yang baik. Jika manajemen mampu mengelola keuangan, menyusun laporan sesuai standar, dan konsisten menyelesaikan pekerjaan dengan benar, maka tingkat ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan dapat meningkat.

Berdasarkan pengamatan terhadap proses kerja pengurus koperasi, kinerja pengurus dipilih sebagai variabel ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban

keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kab. Karangasem. Hal ini disebabkan karena sebagian pengurus koperasi merasa tidak nyaman dalam bekerja karena lingkungan kerja, dan banyak pengurus koperasi yang memiliki persentase pengalaman kerja yang rendah. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kinerja pengurus adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi mengenai prosedur penyaluran kredit dan manajemen risiko untuk menghindari kredit bermasalah. Hal ini juga dapat menjadi pertanda bahwa pengurus koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 30 dan 35. mengatur bahwa RAT harus pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi harus disampaikan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran koperasi. Namun, dari tahun 2019 hingga 2021, koperasi di Kabupaten Karangasem belum menerapkan RAT yang sama atau lebih besar dari 100% dari total koperasi aktif tahunan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan suatu organisasi dibutuhkan suatu kinerja sumber daya manusia, dalam hal ini pengurus koperasi yang mengedepankan kompetensi dan kinerja prima. Dalam upaya menstabilkan dan memulihkan perkembangan koperasi yang signifikan dan diimbangi dengan kualitas kinerja dengan meningkatkan prestasi kerja. Dengan kinerja pengurus yang baik tentunya akan menuntun koperasi tersebut lebih berkembang dengan perolehan KSP berpengaruh terhadap SHU KSP, dan hasil temuan (Pongilatan, Tawas, & Tiwow, 2020) arah pengaruh perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh motivasi anggota dan kinerja pengurus. Berdasarkan temuan tersebut, jadi kinerja pengurus akan di uji coba dalam

penelitian ini sehingga diketahui apakah ada pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan KSP Kab. Karangasem

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor sejauh mana pelaporan pertanggungjawaban keuangan diselesaikan tepat waktu. Hal ini di samping faktor kinerja pengurus dan pemahaman laporan keuangan pengurus koperasi. Perkembangan teknologi mempermudah dan mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan, salah satunya dalam bidang akuntansi akan mempermudah seperti dalam proses transaksi, penyajian laporan keuangan yang akurat dan akan tersaji secara otomatis yang dapat lebih efektif dan efisien serta minimnya resiko kesalahan yang terjadi. Teknologi informasi akan sangat memiliki nilai guna jika bila dioperasikan oleh orang yang memiliki keterampilan dalam bidangnya. Dimana temuan penelitian yang dilakukan oleh (Adita Waspidipa, 2013) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, temuan penelitian (Trisaputra, 2013) bahwa teknologi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pemanfaatan teknologi informasi dipilih sebagai variabel pada seberapa tepat waktu koperasi simpan pinjam di kabupaten Karangasem melaporkan pertanggungjawaban keuangan, karena seiring dengan perkembangan teknologi, dengan memaksimalkan pemanfaatannya dalam suatu pekerjaan, khususnya koperasi dapat mempercepat penyelesaian koperasi dapat mempercepat penyelesaian suatu tugas dan mengurangi banyaknya kesalahan yang terjadi. saat mencatat dan menyusun laporan keuangan dengan memanfaatkan secara maksimal. Dapat ditarik kesimpulan

bahwa teknologi informasi sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup organisasi serta untuk pekerjaan yang lebih efektif dan efisien yang dapat mempercepat pertumbuhan organisasi, penyajian laporan tepat waktu, dan implementasi RAT. Hal ini sejalan dengan prinsip penelitian yang dilakukan oleh (Yadnya, 2017), (Putra2016), menemukan bahwa penggunaan teknologi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan sesuai periode. Berbeda dengan temuan oleh (Maharani & Agustin, 2021), dan (Wardani & Andriyani,2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah negara. Pemanfaatan teknologi akan diuji kembali untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem dalam ketepatanwaktuan pelaporan pertanggungjawaban keuangannya.

Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, serta antara perluasan lokasi penelitian dan berbagai lokasi penelitian, menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini sebanding dengan (Isnayanti, 2021). Dalam penelitian ini satu variabel ditambahkan yaitu, kinerja pengurus. Variabel kinerja pengurus dipilih dengan alasan bahwa variabel ini merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung tepat waktunya pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Serta adanya keterbatasan temuan penelitian sebelumnya yang mengakibatkan hasil yang tidak konsisten.

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Laporan Keuangan Koperasi, Kinerja Pengurus Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan**

## **Pertanggungjawaban Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Karangasem”**

### **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya fluktuasi perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif setiap Kabupaten di Bali.
2. Pemerintah memberikan BSU kepada setiap koperasi di Kabupaten Karangasem. Namun, dari tahun 2019 hingga 2021, terdapat 108 koperasi nonaktif di Kabupaten Karangasem yang tersebar di 8 kecamatan dan 78 desa/kelurahan. Terjadinya permasalahan tersebut disebabkan karena beberapa faktor pada koperasi yang belum melaksanakan RAT hingga 100% dari total jumlah koperasi aktif, diantaranya adanya prestasi kinerja pengurus yang rendah, baik dari pemahaman laporan keuangan, kurangnya pemanfaatan teknologi, sehingga tidak mampu menjalankan tuntutan yang dikerjakan seperti melaksanakan RAT dan pelaporan keuangan secara tepat waktu.

### **1.3 Pembatasan masalah**

Secara khusus variabel yang diperhatikan dalam masalah penelitian ini yaitu Pemahaman Laporan Keuangan Koperasi (X1), Kinerja Pengurus (X2), dan



Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) serta Ketepatanwaktuan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan KSP Kab. Karangasem (Y). Membatasi masalah memungkinkan penelitian lebih terfokus. Koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem yang masih beroperasi akan menjadi satu-satunya fokus penelitian ini.

#### 1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman laporan keuangan koperasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pertanggungjawaban keuangan KSP di Kab. Karangasem?
2. Apakah kinerja pengurus berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pertanggungjawaban keuangan KSP Kab. Karangasem?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pertanggungjawaban keuangan KSP Kab. Karangasem?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan situasi dan bagaimana masalah itu dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek berikut:

1. pemahaman laporan keuangan koperasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pertanggungjawaban keuangan KSP Kab. Karangasem.

2. kinerja pengurus berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pertanggungjawaban keuangan KSP Kab. Karangasem.
3. pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pertanggungjawaban keuangan KSP Kab. Karangasem.

### **1.6 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, baik manfaat secara teoritis atau secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi terkait Pengaruh Pemahaman Laporan Keuangan Koperasi, Kinerja Pengurus Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan iPertanggungjawaban Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji teori, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Pemahaman Laporan Keuangan Koperasi, Kinerja Pengurus Dan dan penggunaan teknologi

informasi terhadap seberapa cepat koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem melaporkan keuangannya.

2) Bagi Lokasi penelitian

Dengan bantuan penelitian ini dapat diambil keputusan dan implementasi kebijakan yang berguna sebagai masukan dan bahan referensi. khususnya yang berkaitan dengan komitmen koperasi untuk melaksanakan RAT secara tepat waktu. Dan mempertimbangkan dalam pemilihan dalam pengurus koperasi yang menjadi faktor utama terlaksananya kegiatan dan kewajiban koperasi simpan pinjam.

3) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat guna dapat dijadikan gambaran dalam meningkatkan wawasan akademisi serta mampu dijadikan sebagai suatu referensi yang baik dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis dan berkaitan dengan koperasi.

